

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini bangsa Indonesia telah melewati suatu babak baru dalam pelaksanaan demokrasi, di mana pemilihan umum mulai dari pemilihan legislatif sampai pada dua kali pemilihan Presiden boleh terlaksana dengan aman, jujur dan adil. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung dengan memilih kandidat-kandidat baik dari calon legislatif maupun calon eksekutif, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih sendiri kandidatnya. Pasca reformasi tahun 1998 ini banyak mengalami perubahan mendasar yang terjadi dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, diantaranya Pemilu tahun 1999 yang bersifat multipartai, dimana dibukanya kembali kesempatan untuk bergerak nya partai politik secara bebas termaksud mendirikan partai baru.¹ Kemudian yang sangat signifikan lagi terjadi dalam Pemilu tahun 2004 kemarin, selain multipartai, Pemilu 2004 yang lalu merupakan Pemilu pertama dimana rakyat memilih secara langsung wakil rakyatnya.

Pemilihan umum di tahun 2004 itu tentulah merupakan pemilihan umum perdana yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih secara langsung. Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik. Tidak cukup sampai disitu perubahan juga terjadi dalam proses pemilihan

¹ Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi, Gramedia. Pustaka Utama Jakarta. Hlm 483

Presiden dan Wakil Presiden dimana rakyat pun diberi kesempatan untuk dapat memilih secara langsung Presiden dan wakilnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing pemilih, pemilihan umum Presiden dan wakilnya tersebut dilakukan dengan sistim dua putaran. Artinya, kalau ada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan peserta dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga yang menjadi tujuan pokok adalah adanya pasangan calon yang terpilih yang mempunyai legitimasi kuat dengan perolehan suara 50% plus satu atau mayoritas mutlak. Seandainya pada putaran kedua tidak ada yang memperoleh suara 50% plus satu, yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan pemenang adalah pemerataan dukungan suara di tingkat propinsi ataupun Kabupaten/kota.

Pemilihan Presiden secara langsung ini juga berdampak dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti yang diamanatkan UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung sebagaimana proses pemilihan Presiden dalam pemilu 2004 yang lalu, sehingga tingkat keterlibatan publik dalam proses politik kenegaraan semakin lengkap. Di samping itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini juga merupakan sebuah peluang menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel.

Implementasi demokrasi langsung itu juga terwujud dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Kabupaten Poso.

Pemilihan kepala daerah pertama kali dilakukan pada tahun 2005 dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2010 kemarin. Kegiatan itu berlangsung dengan aman dan kondusif karena didorong oleh kesadaran masyarakat yang peduli terhadap kegiatan Pemilukada tersebut, sehingga harapan mereka bisa memilih calon Bupati dan wakil Bupati yang tepat dan selalu mengutamakan dan mempedulikan kepentingan rakyatnya. Pelaksanaan pemilukada Kabupaten Poso itu merupakan tonggak sejarah titik awal dari otonomi secara murni artinya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung membuktikan bahwa demokrasi sudah tumbuh secara murni dilakukan di Kabupaten Poso.

Pada pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Poso, ada empat (4) pasangan calon yang menjadi kontestan, diantaranya Pasangan Hendrik Gary Lyanto Dan Abdul Muthalib Rimi, SH, MH yang di usung oleh partai Golkar dengan perolehan suara 18.992 suara (16,32 %), Sonny Tandra, ST dan H. Muliadi yang di usung oleh partai PDIP dan Patriot dengan jumlah suara 30.712 (26,38%), Frans Wangu Lemba Sowolino, SE, M.Si dan Burhanuddin Andi Masse, S.Kom, yang di usung PKP dan PDS memiliki perolehan suara 21.579 (18,54%) Drs. Piet Inkiriwang, MM dan Ir. Samsuri, M.Si yang di usung Partai Demokrat dengan jumlah perolehan suara 45.119 (38,76%)

Dengan melihat data perolehan suara di atas salah satu kontestan yang menang pada pemilukada tahun 2010 adalah Drs Piet Inkiriwang dan Ir Samsuri, M.Si yang di usung oleh partai demokrat dengan jumlah perolehan suara yang sangat signifikan 45.119 atau 38,76%. Kemenangan pasangan calon ini dapat diduga karena faktor ketokohan seorang Piet Inkiriwang yang sudah dikenal oleh

masyarakat luas serta calon ini sangat populer dan juga didukung oleh Partai Demokrat, partai besar yang berkuasa saat ini.

Para pemilih merupakan *rational voters* yang mempunyai tanggungjawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas dan kemampuan kontrol yang kritis terhadap kandidat pilihannya, yang meninggalkan ciri-ciri *traditional voters* yang fanatik, primordial dan irasional, serta berbeda dari *swinger voters* yang selalu ragu-ragu dan berpindah-pindah pilihan politiknya.² Pemilih yang di dalamnya pemilih pemula merupakan pemilih yang potensial. Karena pemilih pemula adalah subjek partipasi dan bukan objek mobilisasi. Jika kita sandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset pe-masaran *Frontiers* atas 2.500 pemilih pemula di lima kota besar di Indonesia mengungkapkan mereka condong memilih partai-partai besar.³

Secara teoritik ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap seseorang dalam menjatuhkan pilihannya kepada calon tertentu. Menurut Adman Nursal⁴ bahwa kualitas pemimpin merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keputusan memilih. Kebenaran pernyataan ini secara empirik dapat ditunjukkan oleh kemenangan Presiden SBY pada pilpres 2009 dimana SBY merupakan sebuah tokoh yang cukup dikenal (*Popular*) oleh masyarakat dan juga sebagai *incumbent* yang juga diusung oleh partai besar.

² Riyanto, 2004. Iklan Politik, era image, dan kekuasaan media, jurnal Nirmana Vol 6 no 2.hlm. 143-157

³ Mukti Sitompul, *Perilaku Pemilih Pemula Tahun 2004*(Studi Kasus Pada Mahasiswa USU Fisip Angkatan 2003 di akses sabtu 19/11/2011

⁴ Adman nursal, 2004 *Political Marketing : Strategi memenangkan pemilu*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm 75

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Poso, Jumlah pemilih Kabupaten Poso Tahun 2010 yang memiliki hak pilih sebanyak 142. 151 orang yang tersebar di seluruh TPS. Dari jumlah pemilih tersebut pemilih pemula yang memiliki hak pilih sebanyak 4.515 atau 3,18% dari jumlah pemilih yang tersebar di 460 TPS yang ada di kabupaten Poso. Jumlah pemilih pemula tersebut tentunya membawa dampak yang berpengaruh pada kemenangan seorang kontestan atau calon.

Dalam undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan Pemilu). Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih (*voting*) pada pemilu sebelumnya. Namun, ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik, namun mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh dalam Mukti melalui bukunya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*,⁵ menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Selain itu, selama ini ada beberapa faktor

⁵ Mukti, *Op.cit* hlm 2

yang mempengaruhi perilaku pemilih menurut Malin dalam Kushartono⁶ diantaranya 1). Identitas partai, dimana semakin solid dan mapan suatu partai politik maka akan memperoleh dukungan yang mantap dari para pendukungnya begitu pula sebaliknya, 2). Kemampuan partai dalam menjual isu kampanye. Partai *status quo* biasanya menjual isu-isu keamanan dan keberhasilan yang telah mereka raih. Partai-partai politik baru biasanya menjual isu-isu “menarik” dan partai politik tersebut biasanya dianggap “bersih” terutama dari nuansa *money politic*, 3). Penampilan kandidat, dimana performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat.

Faktor – faktor tersebut merupakan suatu hal yang fenomenal dan menjadi perhatian masyarakat dalam pemilukada khususnya dikalangan pemilih pemula yang menjadi dasar dalam menentukan tindakan politiknya, sehingga faktor ini dapat menjelaskan sebab dan arah perilaku pemilih pemula yang akan dibuktikan melalui penelitian ini.

Dari fakta-fakta empirik tersebut yang juga didukung oleh aspek teoritik maka sangat menarik untuk mencermati kecenderungan perilaku politik pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon atau kandidat tertentu di Kabupaten Poso pada Tahun 2010.

⁶ Kushartono, 2006, *Perilaku pemilih di Kabupaten Sukabumi* (studi kasus perilaku pemilih pada pemilihan Kepala Daerah secara langsung Tahun 2005 dikecamatan pelabuhan ratu, cisaat dan jampangkulon Kabupaten sukabumi, Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. hlm 54

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 sehingga rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Sejauh manakah faktor figur kandidat berpengaruh terhadap perilaku politik Pemilih pemula pada Pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010 ?
2. Sejauh manakah identifikasi Partai berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih pemula pada Pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010 ?
3. Sejauh manakah isu dan kebijakan berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih pemula pada Pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010 ?
4. Sejauh manakah faktor figur kandidat, identifikasi partai, isu dan kebijakan berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih pemula pada pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010 ?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana faktor figur kandidat berpengaruh terhadap perilaku politik Pemilih pemula pada pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010.

2. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana identifikasi Partai berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih pemula pada pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010.
3. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana isu dan kebijakan berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih pemula pada pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010
4. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana figur kandidat, identifikasi partai, isu dan kebijakan berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih pemula pada pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis; penelitian ini sebagai salah satu kajian politik dan pemerintahan, terutama berkaitan dengan orientasi politik dan perilaku politik.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Peneliti ; Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang bagaimana perilaku politik para pemilih pemula pada pemilukada.
 - b. Bagi Pemilih Pemula ; Para pemilih pemula bisa mengetahui perilaku mereka dalam pemilukada.
 - c. Bagi partai politik dan kandidat ; Agar mereka lebih meningkatkan pendidikan politik melalui seminar - seminar dan kegiatan politik yang bisa berorientasi pada pemilih pemula.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Perilaku Politik

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.⁷ Perilaku politik adalah proses timbal balik di dalam suatu negara antara pembuatan keputusan dengan warga negara biasa yang bertindak sebagai pihak yang hanya dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik tersebut. Perilaku politik juga adalah kegiatan-kegiatan yang memiliki hubungan dengan politik, atau disebut kegiatan politik. Oleh karena itu, perilaku politik dibagi dua, yakni perilaku politik lembaga lembaga dan para pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga negara biasa.⁸ Kegiatan politik lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga politik tersebut adalah bertanggungjawab atas wewenang proses politik, sedangkan kegiatan politik warga negara biasa adalah partisipasi politik. Jika dikaitkan dengan Pemilu, warga negara biasa memiliki andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan daerahnya.

Deskripsi Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial,

⁷ Ramlan Surbakti., 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta, hlm 15.

⁸ *Ibid*, hlm 16 .

politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya.⁹ Abdul Munir Mulkan melihat perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut.¹⁰ Sedangkan menurut Jack C. Plano dkk dalam Moh. Ridwan perilaku politik adalah: “Pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan.”¹¹

Teori perilaku politik adalah sebagai salah-satu aspek dari ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik seseorang, ideologi dan tingkat partisipasi politik. Secara teoritis, perilaku politik dapat diurai dalam tiga pendekatan utama yakni melalui pendekatan sosiologi, psikologi dan domain kognitif.¹² Perilaku politik juga bisanya di pahami sebagai tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan - tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobyng, kaukus, kampanye dan demonstrasi)”.¹³

Setiap manusia pasti memiliki perilaku (tindakan) tersebut, yakni suatu totalitas dari gerak motorik, persepsi dan juga fungsi kognitif dari manusia.¹³ Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:

1. diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,

⁹ Kristiadi,1993, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih* (Disertasi), hlm. 23

¹⁰ Abdul Munir Mulkan,2009, *Politik Santri. Kanisius*, Yogyakarta. Hlm 37

¹¹ Ridwan Moh,1997, *Perilaku NU Pasca Pernyataan Kembali ke Khittah 1926*, Skripsi Fisip Unila. Tdk dtrbtkn

¹² Adman Nursal, *op.cit.* hlm. 54

¹³ <http://blog.unila.ac.id/maulana/files/2009/02/Isi-Laporan-Pengabdian.pdf>. di akses 16/7/2011

2. terjadi pada situasi tertentu,
3. diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan
4. terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.¹⁴

Tindakan manusia merupakan sebagai hasil komulatif seluruh proses pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologis dan efek dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, sedangkan perilaku pada dasarnya terarah pada tujuan yang dilakukan untuk memuaskan kebutuhannya sebagaimana dihayati dalam dunianya, yaitu dunia menurut penghayatannya. Dengan demikian, pengertian tindakan berkaitan dengan perilaku, dimana antara keduanya saling terikat dan faktor yang mempengaruhi perilaku adalah sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan. Perilaku politik juga merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politotoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tersebut.¹⁵ Perilaku politik merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu subyek yang dapat berupa pemerintah juga masyarakat.

Selain itu, terdapat kaitan yang erat antara perilaku politik dan budaya politik. yaitu bahwa perilaku politik tidak hanya ditentukan oleh situasi temporer, tetapi mempunyai pola yang berorientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik yang bisa disebut peradaban politik. Artinya, perilaku politik tumbuh atas kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlangsung atau tentang ideologi negara yang sedang dianut di masyarakat

¹⁴ Hi. Syafarudin, 2011, *Pendidikan Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu*. Laporan Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat

¹⁵ Sastroatmodjo, Sudiono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press. hlm 21

tersebut serta interaksi yang muncul antara masyarakat, individu dan budaya politik tersebut.

Proses politik akan melahirkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang kemudian akan disosialisasikan melalui transmisi kebudayaan, baik melalui pendidikan keluarga, kelompok-kelompok pergaulan, di lingkungan pekerjaan, interaksi melalui model media komunikasi massa, maupun interaksi politik secara langsung. Sehingga kemudian dapat memilahkan kategori budaya politik tersebut atas tiga pemilahan, yaitu budaya politik partisipan, budaya politik subyek dan budaya politik parokialik.¹⁶

Tipe budaya politik dalam tiga bentuk, yaitu :

- a) Budaya politik parokial, yaitu terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit atau yang bersifat provinsial.
- b) Budaya politik subyek, yaitu anggota, masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama segi outputnya.
- c) Budaya politik partisipan, yaitu suatu bentuk kultur di mana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif, dengan kata lain terhadap aspek input dan output dari sistem politik itu.¹⁷

Perilaku politik dalam Pemilu akan selanjutnya disebut juga sebagai perilaku memilih. Dalam memahami perilaku pemilih, akan digunakan beberapa

¹⁶ Almond dan Verba, 1984 *Budaya Politik Tingkah Laku Politik*, Bina Aksara, Jakarta. hlm 14-22

¹⁷ *Ibid*

pendekatan yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi dan pendekatan Domain kognitif.

a. Pendekatan Sosiologi

Secara garis besar, pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial serta pengelompokan kemasyarakatan mempunyai pengaruh kuat terhadap perilaku memilih.¹⁸ Pendekatan sosiologi pertama kali di temukan oleh Universitas Columbia (*Columbia's University Bureau of Applied Social Science*) atau lebih dikenal dengan kelompok columbia. Dengan menerbitkan dua karya yakni *The People's Choice* pada tahun 1948 dan *Voting* pada tahun 1952. Dalam karya tersebut di ungkapkan bahwa perilaku politik seseorang terhadap partai politik dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi atau hubungan etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain, atau yang di sebut pengelompokan sosial.

b. Pendekatan Psikologi

Pendekatan psikologi pertama kali di temukan oleh Pusat Peneliti dan Survey Universitas Michigan (*University of Michigan's Survey Research Centre*). Hasil dari karya kelompok Michigan yang penting disitu adalah *The Voter's Decide* (1954) dan *The Amerika Voter* (1960). Pendekatan ini sekurang-kurangnya menurut Campbell (1954) dimasukdikan untuk melengkapi pendekatan sosiologi yang kadang-kadang dari segi

¹⁸ Ari Pradanawati & Tri Cahyo. 2008, *Pemilu dan Demokrasi*, Fisip Undip. Hlm. 21

metodologi agak sulit menentukan kriteria pengelompokan masyarakat. Selain itu ada kecenderungan bahwa semakin lama dominasi kelas tertentu terhadap partai politik tentu tidak lagi mungkin mutlak. Inti dari pendekatan psikologi adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan sikap dan perilaku pemilih.

c. Pendekatan Domain Kognitif

Dalam mengembangkan model tersebut mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dalam memprediksi perilaku pemilih.¹⁹

Perilaku pemilih di tentukan oleh 7 (tujuh) domain kognitif yang berbeda dan terpisah,²⁰ sebagai berikut :

- (1) Isu dan kebijakan politik (*issue and policies*), yaitu mempersentasikan kebijakan atau program (platform) yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat jika menang.
- (2) Citra sosial (*social image*), yaitu menunjukkan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi

¹⁹ Nursal, Adman, 2004, Political Marketing : *Strategi Memenangkan Pemilu*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 69

²⁰ *Ibid*

antara kandidat atau partai dan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.

- (3) Perasaan emosional (*emotional feelings*), yaitu dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditujukan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
- (4) Citra Kandidat (*candidate Personality*), yaitu mengacu pada sifat sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat.
- (5) Peristiwa mutakhir (*current evants*), yaitu mengacu pada peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
- (6) Peristiwa personal (*personal events*), yaitu mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rszim tertentu, menjadi tokoh pejuang, ikut berperang.
- (7) Faktor – faktor epistemik (*epitemic issues*), yaitu adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru.

Beberapa hasil studi dan catatan tentang perilaku pemilih Indonesia dapat disimpulkan adanya beberapa faktor penting sebagai berikut : (1) Orientasi agama; (2) faktor kelas sosial dan kelompok sosial lainnya; (3) Faktor kepemimpinan dan ketokohan; (4) faktor identifikasi; (5) orientasi baru;

(6) orientasi kandidat; (7) kaitan dengan peristiwa (8) rekonfigurasi papan catur politik.²¹

2.2 Pemilih Pemula

Dalam undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/belum menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan Pemilu). Keberadaan kalangan pemilih pemula telah menjadi objek kajian politis bagi hitungan pemilu mendatang. Kurang lebih 20% pemilih pemula, yang merupakan generasi muda, akan menjadi sasaran empuk bagi para partai politik yang ada. Tentu hal ini tidak akan disia-siakan begitu saja, lantaran jumlahnya yang cukup signifikan. Adapun menurut Riswanda Imawan, Pemilih Pemula adalah mereka yang baru pertama kali akan ikut dalam pemilu.²² Pemilih pemula juga dianggap menjadi “ladang emas” suara bagi keseluruhan partai politik. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini tentu akan bisa dirasakan keuntungannya.

Pemilih pemula juga memiliki ciri khas seperti, memiliki antusiasme tinggi, relatif rasional, haus akan perubahan, dan tipis kadar

²¹ Gaffar, Afan, 1992, *Javanese Voters: A Case Study of Elections Under a Hegemonic Party*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hlm 191

²² Riswanda Imawan 1997, *Membedah Politik orde baru*. Pustaka Pelajar (anggota IKAPI). Yogyakarta.

pragmatisme.²³ Bahkan Pemilih pemula cenderung apatis dengan elite parpol, apalagi mayoritas parpol masih menonjolkan figur tua.

2.3. Beberapa Variabel Penjelas dalam Perilaku Politik Pemilih

a. Figur Kandidat dan Perilaku Pemilih

Person adalah profil dari kandidat yang akan dipilih melalui suatu kontestasi politik, yang secara otomatis dapat membentuk sikap politik pemilih dalam menetapkan pilihannya. Bahkan person atau figur kandidat seringkali menentukan keputusan pilihan dibandingkan dengan policy. Hal ini berkaitan dengan proses pembentukan keyakinan para pemilih, bahwa para pemilih lebih mudah diyakinkan dengan menawarkan figur manusia. Orang lebih muda terinformasi oleh fakta mengenai manusia dibandingkan *policy*.²⁴

Kualitas kandidat dapat dilihat dari tiga dimensi sebagai berikut²⁵ :

(1) Kualitas instrumen, yaitu kompetensi kandidat yang meliputi kompetensi manajerial, berkaitan dengan kemampuan untuk menyusun rencana, pengorganisasian, pengendalian, dan pemecahan masalah untuk mencapai sasaran objektif tertentu, dan kompetensi fungsional, terkait dengan keahlian bidang-bidang tertentu. (2) faktor simbolis, yang meliputi prinsip-prinsip hidup maupun nilai-nilai dasar yang dianut oleh seorang kandidat, aura emosional, aura inspirasional, dan aura sosial, (3) fenotipe

²³ <http://bataviase.co.id/node/763639> di akses Kamis 13/10/2011

²⁴ Nursal, Adman, 2004, *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 206

²⁵ *Ibid Hlm.207*

optis, yakni penampakan visual seorang kandidat yang terdiri dari faktor pesona fisik, faktor kesehatan dan gaya kepemimpinan.

Suatu literatur yang signifikan dan berkembang yang menyatakan bahwa kandidat – kandidat itu sendiri adalah sumber yang penting untuk mendapatkan suara di beberapa Negara dan beberapa pemilihan yang signifikan. Kandidat – kandidat dapat menarik dukungan untuk siapakah mereka, atau apa yang telah mereka lakukan, atau apa yang akan mereka lakukan, bukan hanya atas pertimbangan partai yang mengusung mereka. Ada beberapa pertimbangan yang bagus untuk itu. Di bawah sistim pemilihan tertentu, kandidat secara individu memiliki dorongan yang kuat untuk membedakan diri mereka sendiri dari yang lain dalam partai mereka dan berguna untuk mengembangkan “*personal following*”. Stimulus akan lebih tinggi dimana suara berdasarkan kandidat bukan partai dan dimana suara secara signifikan berpengaruh tidak hanya kepada partai pemenang kursi namun diikuti oleh pengaruh kandidat.²⁶

Newman dalam Sugiono, *The Mass Marketing of Politics, Democracy in Age of Manufacture Image*, menegaskan bahwa setiap individu dalam perannya sebagai pemilih, selalu berusaha untuk melihat secara utuh sang kandidat.²⁷ Perbedaan antara individu dan kualitas strategi bukan berarti keduanya tidak terkait, keduanya mungkin berkontribusi secara langsung pada prospek pemilihan dari

²⁶ Mars, 2005, *Candidat or Parties? Objects Of Electoral Choice in Ireland*.

²⁷ Sugiono, 2005, *Faktor yang Mempegaruhi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Perspektif Political Marketing*, hlm 7

kandidat yang potensial dan *incumbents*. Mereka seharusnya saling berhubungan juga. Jika para pemilih memperhatikan kualitas personal dari kandidat untuk menjabat, maka para penyokong dana dan orang – orang yang mengendalikan sumber daya kandidat perlu untuk menawarkan suatu kampanye yang efektif.

b. Identifikasi Partai dan Perilaku Pemilih

Identifikasi partai diartikan sebagai ikatan psikologis seseorang kepada suatu partai tertentu.²⁸ Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Partai adalah perkumpulan atau segolongan orang yang seases, sehaluan, dan setuju terutama dibidang politik.³⁰ Identifikasi kepartaian adalah ikatan emosional individu dengan suatu partai. Ikatan itu merupakan identifikasi psikologi tanpa pengakuan formal atau dinyatakan dalam bentuk keanggotaan formal dan bahkan tidak dinyatakan dalam bentuk keanggotaan formal dan bahkan tidak harus konsisten untuk mendukung suatu partai. Identifikasi partai telah diperoleh dari masa kanak-kanak dan dianggap relatif stabil dalam

²⁸ Gaffar Afan, *Javanese Voters*.Jogakarta .1992

²⁹ Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

³⁰ Marbun, BN, 2003, *Kamus Politik*, hlm 402

kehidupan seseorang, tetapi kadang-kadang bisa menguat atau melemah sewaktu masa dewasa.³¹

Peranan identifikasi partai mungkin menurun atau kurang signifikan untuk menjelaskan perilaku pemilih apabila faktor isu dan kandidat lebih dominan. Tetapi apabila individu tidak memiliki persepsi yang utuh tentang isu dan prestasi partai atau kandidat, maka peranan identifikasi partai akan sangat kuat.³² Sejarah identifikasi partai telah menjadi suatu konsep ekstensi yang digunakan dalam hubungannya dengan pemilih. Dasar pemikiran untuk itu telah dianggap stabil, menjadi penyebab utama pemilih untuk memilih dan kemampuannya untuk meramalkan secara lebih baik mengenai hasil pemilihan.³³

Identifikasi seseorang dengan partai politik tertentu memerlukan waktu yang lama melalui proses sosialisasi politik berupa transformasi nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlangsung secara terus menerus. Dalam masyarakat yang menggunakan nilai-nilai kepatuhan kepada atasan, orang tua, dan lain-lain, maka ikatan psikologis seseorang dengan partai politik tertentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sikap pimpinan masyarakat terhadap partai politik tersebut.

³¹ Noris, Pippa, 2005, *Political and Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives* : Development in Party Communicatins.

³² Kristiadi, *Op.cit* hlm 57

³³ Hinkle James R, 2004, *Causes of Voter Choice : An Analysis of the 2004 Presidential Elections and the Choice of American Voters to re-elect George W. Bush to the Office of President*, Hlm 7

c. Isu dan Kebijakan

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih. Sekelompok orang bisa saja memilih sebuah partai atau kandidat politik, karena dianggap sebagai representasi dari agama atau keyakinannya. Tetapi kelompok yang lainnya memilih karena partai atau kandidat tertentu dianggap representasi dari kelas sosialnya. Ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada partai atau figur tertentu.³⁴

Issues and Policies (Isu dan Kebijakan Politik)

Komponen issues and policies mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang Pemilu. Platform komponen issues and policies mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang pemilu. Platform dasar yang sering ditawarkan oleh kontestan Pemilu kepada para pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan hukum dan karakteristik kepemimpinan.³⁵

Current Events (Peristiwa Muktahir)

Current Events mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. Current events meliputi masalah domestik dan masalah luar negeri. Yang dimaksud masalah domestik misalnya tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan

³⁴ Nursal, 2004, Political Marketing : *Strategi Memenangkan Pemilu*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm 53

³⁵ *Ibid* hlm. 72

separatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Yang termaksud masalah luar negeri misalnya perang antar negara-negara tetangga, invasi ke sebuah negara, dan sebagainya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.

Personal Events (Peristiwa Personal)

Personal events mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan tertentu, ikut berperang mempertahankan tanah air.

Epistemic Issue (Faktor-faktor Epistemik)

Epistemic issues adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keinginan para pemilih mengenai hal-hal baru. Epistemic issue sangat mungkin muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang sedang berjalan.

2.4. Pemilukada

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal

ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia. Pemilukada langsung merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena Pemilukada langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyat.³⁶

Dengan Pemilukada langsung maka akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Elit politik atau partai politik tidak bisa lagi menjatuhkan seenaknya seorang kepala daerah (kecuali ia melakukan tindakan kriminal dan mengkhianati negara atau makar) karena ia merupakan pilihan rakyat, suara rakyat adalah pilihan rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dey*). Oleh karena itu seorang presiden yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi yang tinggi³⁷

Pemilu eksekutif daerah ini berada dalam koridor demokrasi lokal dalam lingkup asas pemerintahan yang desentralisasi dan didasarkan pada rel kebijakan publik UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Kepala daerah langsung merupakan fenomena baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sepanjang sejarah pemerintahan, baru sekarang ini akan dilaksanakan Pemilukada secara langsung yang selama tahun 2005 melibatkan 16 pemda Propinsi dan 118 pemda Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia. Melihat begitu banyaknya pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada

³⁶ Lili Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 320

³⁷ *Ibid*

tersebut, maka akan menjadi sangat penting bagi semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaannya untuk memiliki persepsi yang sama, sehingga tahun 2005 kemarin bisa dijadikan tonggak demokrasi lokal di Indonesia. Kemudian pada tahun 2010 kemarin terdapat 244 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah, terdiri atas lebih dari tujuh provinsi dan 237 kabupaten/kota.³⁸ Akan sangat disayangkan ketika dalam pelaksanaan di 224 pemerintahan daerah itu terjadi konflik atau permasalahan yang akan merusak dan berakibat fatal pada sistem pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, kita dapat membahas adanya perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituennya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan daerah dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya.

Lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dahulu dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Kekurangan yang terdapat pada undang-undang yang terdahulu adalah perlunya mengatur sistem pemilihan Kepala Daerah dan

³⁸ <http://gorontalo-wwwtaminmunablogspotcom.blogspot.com/2010/03/Pemilukada-dan-konflik-politik.html>. di akses sabtu 16/7/2011

wakil Kepala Daerah secara langsung, sebab diyakini pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Dengan diadakannya metode pemilihan langsung Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh rakyat kemungkinan kolusi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat di eliminasi.³⁹

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 56 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁴⁰

Penyelenggaraan Pemilukada langsung menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersangkutan. Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah maka DPRD harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain memberitahukan kepada Kepala Daerah DPRD juga memberitahukan kepada KPUD perihal berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah minimal lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Setelah pemberitahuan dari DPRD maka KPUD berkewajiban untuk menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan

³⁹ Daniel S. Salossa, *Mekanisme, Persyaratan dan tata cara Pemilukada langsung*, (Yogyakarta, Media Presindo, 2005) hlm. 9

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

pemilihan Kepala Daerah dan telah disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 hari sejak pemberitahuan dari DPRD, membentuk Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS yang mana paling lambat 21 hari sejak pemberitahuan dari DPRD.

Berdasarkan atas pemberitahuan dari DPRD maka Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.⁴¹

Setiap pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pemilukada harus diajukan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik. Partai politik yang akan mengajukan calon Kepala Daerah tersebut harus memperoleh minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD daerah yang bersangkutan atau 15% (lima belas persen) dari jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD daerah tersebut⁴². Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti yang dijelaskan dalam

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pasal 2 ayat 1-4 dan pasal 3 ayat 1-3

⁴² UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan kepala daerah pasal 59 ayat 1 dan 2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

2.5 Tahapan Pemilukada

Berdasarkan UU nomor 32 Tahun 2004 memenuhi syarat disebut sebagai Pemilukada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.⁴³

Pelaksanaan Pemilukada langsung dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan, sebagaimana dikatakan dalam pasal 65 ayat 1.⁴⁴ Selanjutnya pada ayat 2 pasal yang sama disebutkan bahwa kegiatan – kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan adalah :

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
- d. Pembentukan Panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS

⁴³ UU nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁴ Prihatmoko. 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka Pelajar.Jogjakarta. hlm 210

e. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Pada masa persiapan keterlibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan Panitia Pengawas (Panwas), PPK, PPS, dan KPPS serta memiliki akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik melalui lembaga – lembaga tersebut. Selanjutnya tahap pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan sesuai pasal 65 ayat 3,⁴⁵ yaitu :

- a. Penetapan daftar pemilih
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah / wakil kepala daerah.
- c. Kampanye
- d. Pemungutan Suara
- e. Penghitungan Suara
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah / wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

⁴⁵ *Ibid*

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁴⁶

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat kami rumuskan, sebagai berikut :

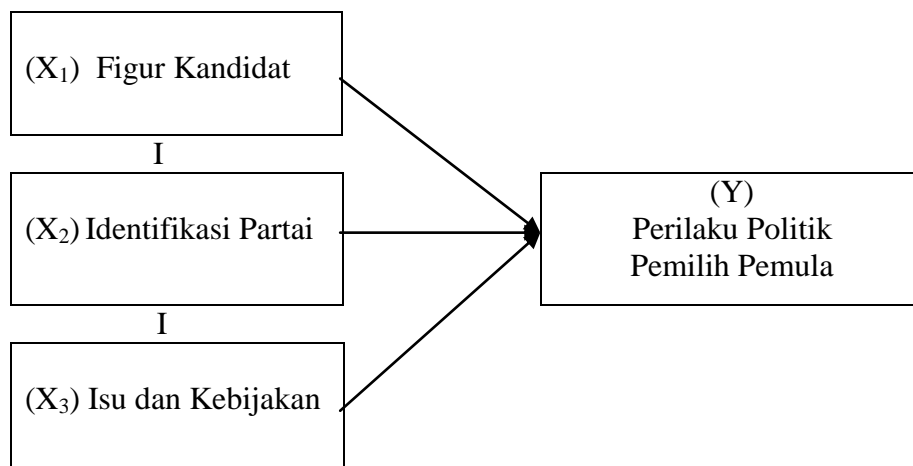
- H₁. Ada pengaruh faktor figur kandidat terhadap perilaku politik Pemilih pemula pada pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010.
- H₂. Ada pengaruh identifikasi partai terhadap perilaku politik pemilih pemula pada pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010
- H₃. Ada pengaruh isu dan kebijakan terhadap perilaku politik pemilih pemula pada pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010
- H₄. Ada pengaruh faktor figur, identifikasi partai, isu dan kebijakan secara simultan terhadap perilaku politik pemilih pemula pada pemilukada Kabupaten Poso tahun 2010.

⁴⁶ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta. Bandung. hlm 70

Gambaran dari kerangka pemikiran teoretis dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.7. Pengujian Hipotesis

Apabila peneliti telah mengumpulkan dan mengolah data, bahan pengujian hipotesis tentu akan sampai kepada satu kesimpulan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Di dalam menentukan penerimaan dan penolakan hipotesis maka hipotesis alternatif (H_a) bisa diubah menjadi hipotesis nol (H_0).⁴⁷

Maka cara pengujian hipotesis ⁴⁸ untuk diterima atau ditolak adalah sebagai berikut:

Jika $H_a > H_0$: Maka hipotesis penelitiannya diterima

Jika $H_a < H_0$: Maka hipotesis penelitiannya ditolak.

Jika $H_a = H_0$: Maka hipotesis penelitiannya ditolak.

⁴⁷ Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. hlm 116

⁴⁸ Fred N Karlinger, 2006, *Asas-asas penelitian behavioral*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm 329- 331

2.8 Teknik Pengujian Hipotesis

Analisis data kuantitatif untuk menjawab permasalahan hubungan atau pengaruh variabel independen dengan dependen serta untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel dependen ditunjukkan dengan perilaku politik pemilih pemula pada pemilu pada 2010 (Y), sedang variabel independen ditunjukkan dengan Figur Kandidat (X1), identifikasi partai (X2) dan Isu kebijakan (X3). Hubungan antar variabel ini akan menggunakan analisa sebagai berikut:

1) Pengujian Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi - variasi dependen.⁴⁹ Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol atau :

$$H_a : b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap dependen.

2). Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

⁴⁹ Imam Ghazali.2009.*Aplikasi analisis Multivariate Program SPSS*.Badan Penerbit UNDIP. Hlm 88

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol atau :

$$H_a : b_i \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel lain.

3). Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2.9 Definisi Konsep dan Operasional Variabel

A. Definisi Konsep Variabel

- a. Perilaku Pemilih : pilihan pemilih pada salah satu pasangan calon berdasarkan pertimbangan tertentu.
- b. Figur Kandidat : tokoh sentral yang mampu menarik minat, perhatian dan dukungan pemilih.
- c. Faktor Identifikasi Partai : besarnya ikatan emosional individu dengan suatu partai tertentu.
- d. Faktor Isu dan Kebijakan : Program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon.

B. Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah dan membatasinya, Variabel-variabel yang diteliti perlu didefinisikan secara operasional. Adapun definisi operasionalnya masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

- a. Perilaku politik pemilih, yaitu apakah responden memberikan suaranya kepada salah satu pasangan kandidat kepala daerah.
- b. Figur Kandidat menggunakan dimensi yaitu tokoh sentral yang mampu menarik minat, perhatian dan dukungan pemilih.

Indikator-indikatornya adalah :

- (1) Memiliki agama yang sama dengan pemilih
- (2) Memahami dan mengetahui adat istiadat
- (3) Memiliki pesona fisik (ganteng dan tinggi)
- (4) Memiliki gaya penampilan (cara berpakaian, bahasa tubuhnya)

(5) Mempunyai Pendidikan minimal sarjana

c. Identifikasi partai : kedekatan pemilih dengan salah satu partai.

Indikator- indikatornya adalah :

- (1) Hubungan kedekatan dengan partai tertentu
- (2) Menjadi anggota partai tertentu
- (3) Mengikuti kegiatan pertemuan partai politik tertentu

d. Isu dan kebijakan yaitu menawarkan kebijakan dan program yang baik.

Indikator- indikatornya adalah :

- (1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
- (2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian dan industri
- (3) Menyelenggarakan bentuk pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan baik
- (4) Meningkatkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat.
- (5) Meningkatkan rasa keadilan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat.
- (6) Penegakan hukum dan meningkatkan rasa aman pada masyarakat.

Variabel - variabel ini di ukur dalam skala pengukuran 1 sampai 4 dengan menggunakan kuesioner sebagai berikut : (1) SP/ sangat penting dengan skornya (4). (2) P/ Penting dengan skornya (3). (3) KP/ kurang Penting dengan skornya (2). (4) STP/ Sangat tidak penting dengan skornya (1).

3.0 Penelitian – Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga menjadi suatu tolak ukur dari sebuah penelitian baru yang menjelaskan variabel – variabel berpengaruh atau mempunyai hubungan maupun tidak.

1. Perilaku Pemilih di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi secara Langsung Tahun 2005 dikecamatan Pelabuhan Ratu, Cisaat dan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi). Kushartono, 2006. Pertama, identifikasi partai politik hanya berperan pada saat pencalonan Bupati / wakil Bupati, setelahnya partai politik pengaruhnya tidak begitu besar. Kedua, kandidat berinteraksi langsung dengan pemilih. Ketiga, isu dan kebijakan yang disusung pasangan calon menjadi hal yang cukup penting. Keempat, pemilih dengan kondisi sosial ekonomi yang mapan akan melihat figur kandidat dan isu yang ditawarkan, sebaliknya pemilih dengan kondisi sosial ekonomi rendah, melihat kepada keuntungan sesaat yang diperoleh.
2. Pemilihan Umum dan perilaku pemilih (study kasus pada perilaku pemilih dikota madya Jogjakarta dan kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada pemilihan Umum 1971 – 1987) Kristiadi, 1993. Pertama, interaksi sosial antara pimpinan dan anggota masyarakat masih paternalistik. Kedua, identifikasi kepartaian masyarakat cenderung mengikuti identifikasi kepartaian tokoh panutannya. Ketiga, struktur sosial dan media massa tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku memilih seseorang. Oleh

karena itu, panutan dan identifikasi kepartaian adalah variabel – variabel yang berpengaruh terhadap perilaku memilih seseorang.

3. Kampanye dan Perilaku Pemilih dalam Pilpres di Indonesia Tahun 2009. LSI 2008, pertama, karena kepribadian kandidat (*candidat Image*). Kedua Isu dan kebijakan yang ditawarkan. Ketiga, identifikasi partai, dan keempat, karena popularitas calon Presiden berpengaruh terhadap perilaku pemilih.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang artinya hasil penelitian berhubungan dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran.

3.1. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.⁵⁰
- b. Data sekunder, data yang menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang di teliti, atau data yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Poso dan Dinas yang berkaitan.

3.2 Populasi Dan Sample

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.⁵¹ Populasi dalam penelitian

⁵⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, edisi pertama Graha Ilmu Yogyakarta, 2006, hlm 16

⁵¹ Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. hlm. 173

ini adalah pemilih pemula yang ada di Kabupaten Poso pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Poso secara langsung tahun 2010, yang mana jumlahnya adalah lebih kurang 4.515 jiwa. Data tersebut kami peroleh dari data KPUD kabupaten Poso dengan melihat usia yang ditetapkan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilih Pemula sebagai berikut :

- a. Berusia 17 tahun.
- b. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT Pemilukada

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵² Dari sekian banyak populasi yang ada tidak memungkinkan untuk mendata satu persatu calon pemilih pemula yang ada di Kabupaten Poso, maka populasi itu akan diwakili oleh sample yang akan diambil dari beberapa Kecamatan se-Kabupaten Poso, maka yang akan menjadi sampel penelitian ini adalah 18 Kecamatan yang kemudian diambil hanya beberapa Kecamatan yang dijadikan tempat dari penelitian ini, jadi jumlah kecamatan yang terpilih adalah 8 Kecamatan yang dijadikan tempat penelitian. Dengan jumlah responden yang akan diambil sebanyak 7-24 orang dari setiap Kecamatan, sehingga jumlah sample keseluruhan adalah 98 responden.

(a) Rumus Menentukan Jumlah Sampel

⁵² Sugiono, 2010. *op.cit* hlm. 91

Untuk menentukan jumlah sampel pemilih yang akan digunakan dalam penelitian ini di gunakan rumus Taro Yamane atau Slovin⁵³ :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

d² : Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95 %)

$$n : \frac{4515}{(4515) \cdot 0,1^2 + 1}$$

$$n : \frac{4515}{46,15}$$

$$n : = 97,83 = 98$$

Jadi jumlah sampel sebanyak **98** responden.

Metode sampling yang digunakan adalah *Cluster Sampling* yaitu menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu Propinsi atau Kabupaten.⁵⁴

Dalam penentuan sampel dilakukan dengan beberapa tahap *Pertama*, memilih Kecamatan yang ada di Kabupaten Poso yang dijadikan sampel penelitian yaitu Kecamatan berjumlah 18 Kecamatan.

⁵³ Riduwan,DR, 2009, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*,Alfabeta. hlm. 71

⁵⁴ Sugiono,Prof, 2009, *Statistika Untuk Penelitian*,Alfabeta. Hlm. 65

Table 3.1
Daftar Jumlah Pemilih Pemula
Di tiap Kecamatan Kabupaten Poso

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Pemula
1	Kec. Poso Kota Utara	184
2	Kec. Poso Kota Selatan	209
3.	Kec. Lore Selatan	128
4	Kec. Lore Tengah	85
5	Kec. Poso Kota	260
6	Kec. Poso Pesisir	446
7	Kec. Poso Pesisir Selatan	130
8	Kec. Poso Pesisir Utara	428
9	Kec. Lage	378
10	Kec. Pamona Utara	810
11	Kec. Pamona Timur	251
12	Kec. Pamona Selatan	428
13	Kec. Pamona Barat	209
14	Kec. Pamona Tenggara	174
15	Kec. Lore Utara	228
16	Kec. Lore Timur	56
17	Kec. Lore Peore	44
18	Kec. Lore Barat	67
	J u m l a h	4515

Sumber : Data KPUD Kabupaten Poso Tahun 2010

Kedua, Memilih responden sebagai sampel pada masing-masing Kecamatan yang terpilih berdasarkan banyaknya jumlah pemilih pemula

dan pertimbangan demografi Kabupaten Poso. Maka dihasilkan sampel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Nama Kecamatan dan Jumlah Sampel hasil Random

No	Kecamatan	Jumlah Sampel
1	Pamona Utara	24
2.	Poso Pesisir	14
3.	Poso Pesisir Utara	13
4.	Pamona Selatan	13
5.	Lage	11
6.	Poso Kota	8
7.	Pamona Timur	8
8.	Lore Utara	7
	Jumlah Responden	98

Sumber : Data di olah sendiri secara random

(b) Menentukan Jumlah Sampel Pemilih atau jumlah Responden

Dari data di atas jumlah kecamatan yang di ambil sebagai wilayah sampel adalah (8) kecamatan Proses pemilihan kecamatan bisa dilakukan menggunakan acak sederhana (misal lewat tabel angka acak diatas)⁵⁵ dan dalam menentukan jumlah sampel pemilih di tiap-tiap kecamatan

⁵⁵ Eriyanto, 2007, Teknik Sampling, LkiS Yogyakarta. Hlm 166-167

dilakukan secara acak (*random*),⁵⁶ yang didasari atas beberapa pertimbangan yaitu :

- (1) Melihat peta politik dan karakter di tiap – tiap kecamatan yang mendukung partai-partai besar/Kandidat Pemenang.
- (2) Memilih kecamatan berdasarkan jumlah pemilih pemula yang terbesar dari masing – masing kecamatan.
- (3) Mampu dijangkau berdasarkan kemampuan dana, tenaga dan waktu.

3.3 Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah tinjauan langsung ke lokasi penelitian sebelum diadakannya penelitian atau pencarian data dilapangan.
- b. Wawancara, adalah pengambilan data dengan wawancara baik dengan sample dan KPUD yang ada di Kabupaten Poso.
- c. Kuesioner, adalah suatu alat yang penting untuk pengambilan data dalam menggunakan metode pendekatan kuantitatif.

3.4 Pengujian Instrumen Pengumpulan Data

3.4.1 Uji Validitas

Validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen penelitian yang digunakan.⁵⁷ Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin di ukur. Alat ukur yang dapat digunakan adalah

⁵⁶ *Ibid. Hlm 167*

⁵⁷ Fauzi, Muchamad, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Walisongo Press. Semarang. hlm.209

hasil angka korelasi antara skor pernyataan dan skor keseluruhan pernyataan responden terhadap informasi dalam kuesioner.

Jika instrument itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut :

Antara 0,800 – 1,000 : sangat valid

Antara 0,600 – 0,799 : tinggi

Antara 0,400 – 0,599 : cukup

Antara 0,000 – 0,199 : sangat rendah (tidak valid).

3.4.2 Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Jadi reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel tersebut. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal dan internal.

Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan *test - retes (stability) equivalent, dan gabungan keduanya*. Secara internal reliabilitas instrumen dapat di uji dengan *menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen* dengan teknik tertentu.⁵⁸ Dalam mencari mencari nilai reliabilitas dengan metode *Alpha* dapat menggunakan bantuan SPSS dengan nilai *cronbach alpha* 0,60 sebagaimana yang dikatakan oleh Nunnally.

⁵⁸ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta hlm. 147

3.5 Teknik Analisa Data

Di dalam teknik analisa data, peneliti banyak menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Berarti data yang diperoleh dari jawaban responden akan dimulai dengan skala yang telah ditentukan.

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau memilah jawaban dari para responden dari hasil angket yang sudah disebar dan mengelompokkan jawaban para responden.
- b) Coding, merupakan pemberian tanda-tanda atau kode dalam setiap jawaban yang telah diberikan kepada responden.
- c) Tabulating, merupakan proses dimana data yang sudah diperoleh dari angket dan sudah dikelompokkan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan secara langsung hasil penelitian tersebut. Tabulasi disini dapat berbentuk perasentase dari data statistik.

Setelah langkah-langkah diatas selesai, selanjutnya adalah menganalisis data, Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisa data kuantitatif ini diperuntukkan untuk menjawab masalah penelitian yaitu perilaku politik pemilih pemula pada pemilkuda tahun 2010.

Dalam penelitian ini, alat bantu analisis data kuantitatif yang digunakan ialah:

- (1) Proporsi dengan memanfaatkan tabel tunggal untuk melihat adanya kecenderungan (trend).

Rumus yang digunakan dalam analisis data kuantitatif untuk menghasilkan arah kecenderungan adalah :

Mean :

$$X = \frac{(X_1+X_2+\dots+X_n)}{n} = \frac{(\sum X_i)}{n}$$

Mean ini digunakan untuk mencari rata-rata dari data kuantitatif frekuensi yang ditampilkan akan menampakkan arah kecenderungan suatu kondisi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah per variabel.

- (2) Cross Tab (Tabel Silang), yaitu alat bantu analisis data yang digunakan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antar variabel.
- (3) Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisa pengujian regresi parsial atau Uji t

Sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan adalah teknik deskriptif analisis kuantitatif dan tabulasi silang dalam menganalisa dan menginterpretasikan data dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya disusun sesuai dengan tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A dan Verba, Sidney, 1984, *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Abdul Munir Mul Khan, 2009, *Politik Santri*. Kanisius, Yogyakarta
- Ari Pradanawati, 2008, *Pemilu dan Demokrasi*, Fisip Undip. Semarang.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Daniel S. Salossa, Mekanisme, *Persyaratan dan tata cara Pemilukada langsung*, (Yogyakarta, Media Presindo, 2005)
- Eriyanto, 2007, *Teknik Sampling*, LkiS Yogyakarta
- Fauzi, Muchamad, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Walisongo Press. Semarang
- Fred N Karlinger, 2006, *Asas-asas penelitian behavioral*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Gaffar, Afan, 1992, *Javanese Voters: A Case Study of Elections Under a Hegemonic Party*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hinkle James R, 2004, *Causes of Voter Choice : An Analysis of the 2004 Presidential Elections and the Choice of American Voters to re-elect George W. Bush to the Office of President*, Denver Strategy Institute, Washington
- Hi. Syafarudin, 2011, *Pendidikan Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu*. Laporan Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- Imam Ghozali. 2009. *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang
- Iversen (1994) dalam Asfar, 2006, *Pemilih dan Perilaku Memilih 1955-2004*

- Jonathan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kristiadi, 1993, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih* (Disertasi).
- Kushartono, 2006, *Perilaku pemilih di Kabupaten Sukabumi* (studi kasus perilaku pemilih pada pemilihan Kepala Daerah secara langsung Tahun 2005 dikecamatan pelabuhan ratu, cisaat dan jampangkulon Kabupaten sukabumi, Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Lili Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat 0 Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. .
- Marbun, BN, 2003, *Kamus Politik*.
- Mars, Michael, 2005, *Candidat or Parties? Objects of Electoral Choice in Ireland*, Trinity College, Dubin
- Martoyo S, (1994), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi ketiga, cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Mukti Sitompul, *Perilaku Pemilih Pemula Tahun 2004*(Studi Kasus Pada Mahasiswa USU Fisip Angkatan 2003 di akses sabtu 19/11/2011
- Noris, Pippa, 2005, *Political and Parties and Democracy in Theoretical and Practical Prespectives : Development in Party Communicatins*,The National Democratic Institute for Internasional Affair, Washington,DC.
- Nursal, Adman, 2004, *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prijono, Onny. 1987. *Kebudayaan Remaja dan Sub-Kebudayaan Delinkuen*. CSIS, Jakarta.
- Prihatmoko, Joko J., 2005 *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- BPS Kabupaten Poso. 2010. Kabupaten Poso Dalam Angka 2010

- Ramlan Surbakti 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta.
- Riswanda Imawan 1997, *Membedah Politik orde baru*. Pustaka Pelajar (anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Riduwan, DR, 2009, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*, Alfabeta.
- Ridwan Moh, 1997, *Perilaku NU Pasca Pernyataan Kembali ke Khittah 1926*, Skripsi Fisip Unila. Tdk dtrbtkn
- Riyanto, 2004, *Iklan politik, era image, dan kekuasaan media*, jurnal Nirmana Vol 6 no 2.
- Sastroatmodjo, Sudiono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sugiono, 2005, *Faktor yang Mempengaruhi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Perspektif Political Marketing*, Majalah Usahawan, No.5, Th 2004, Mei 2005, Jakarta
- Sugiono, Prof, 2009, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta. Bandung
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi, CV*. Alfabeta, Bandung
- Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah**
- <http://gorontalo-wwtaseminmunablogspotcom.blogspot.com/2010/03/Pemilukada-dan-konflik-politik.html>. di akses sabtu 16/7/2011
- <http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=11793&kid=all> di akses 05/07/2011
- [http://blog.unila.ac.id/maulana/files/2009/02/Isi-Laporan-Pengabdian^{.pdf}](http://blog.unila.ac.id/maulana/files/2009/02/Isi-Laporan-Pengabdian.pdf) di akses 11/7/2011

<http://bataviase.co.id/node/763639> di akses Kamis 13/10/2011

<http://qalammag.wordpress.com/features/feature-sosial-politik/virus-ganas-politik-uang> di akses Senin 24/10/2011